

Maruli Simanjuntak Dilantik Jadi KSAD,...



KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.807.250.000

7. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.953.125.000

8. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

9. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 828.100.000

10. Tanah Seluas 2875 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

11. Tanah Seluas 1850 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

12. Tanah Seluas 2970 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 3.118.500.000

13. Tanah Seluas 2017 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 2.117.850.000

Kemudian, Maruli juga tercatat memiliki kekayaan yang berasal dari alat transportasi dan mesin. Sub harta itu Maruli miliki dengan nilai mencapai Rp605.093.000 (Rp605 juta). Berikut rinciannya:

1. MOTOR, PIAGGIO LXV-125IE Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

2. MOTOR, KAWASAKI LX 150E CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

3. MOTOR, BMW K-75 SOLO Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 109.950.000

4. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 452.143.000

Selanjutnya, Maruli juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp2.239.659.810 (Rp2,2 miliar), surat berharga Rp4.382.807.080 (Rp4,3 miliar), kas dan setara kas Rp43.390.069.325 (Rp43,3 miliar), dan harta lainnya Rp900 juta.

Dalam laporan tersebut, Maruli juga memiliki hutang sebesar 21.851.000.000 (Rp21,8 miliar). Dengan demikian, jika jumlah total kekayaan Maruli dikurangi dengan hutang, maka Kekayaan yang dimiliki Maruli berjumlah Rp52.889.538.310 (Rp52 miliar).

Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 103/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Hadir dalam pelantikan tersebut Menkopolkam Mahfud MD, Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan, Menhan Prabowo Subianto, Sekretaris Mendagri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kaproli Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo, dan KSAL Muhammad Ali. ● mar

Kesehatan | 11

Kemenkes Pastikan Pengobatan HIV/AIDS Gratis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah

Kemenkes mengakui, ada alasan penderita HIV/AIDS lebih memilih pengobatan di swasta.

JAKARTA (IM) - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Pambudi memastikan pengobatan HIV/AIDS bisa diakses secara gratis di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Dia menyebut, orang dengan HIV (ODHIV) masuk di dalam program pemerintah.

"Jadi obat-obatannya semua kami suplai, dan mereka yang tidak punya BPJS kesehatan pun itu bisa mengakses, hanya saja kadang ODHIV tidak mau menggunakan BPJS-nya dengan alasan tertentu, misal takut privasinya," kata Imran di Jakarta, Selasa malam (28/11).

Alasan privasi dan stigma dari masyarakat menurut Imran masih menjadi alasan kuat mengapa teman-teman dengan HIV/AIDS memilih untuk berobat di fasilitas kesehatan swasta.

"Ini yang kadang-kadang kami jadi ada laporan, mengapa kok membayar, padahal sebenarnya kalau mereka mau menggunakan jalur program itu gratis, di puskesmas dan rumah sakit pemerintah itu gratis, tetapi mereka masih malu menggunakannya, jadi harus dilihat case by case," ucap Imran.

Ia menegaskan, untuk memastikan pasien dengan HIV/AIDS tidak berhenti mengonsumsi obat, ada dua hal yang mesti dilakukan,

pertama yakni memperluas akses ODHIV untuk pengobatan serta menambah layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) agar ODHIV dapat mengakses terapi antiretroviral (ARV) untuk mengendalikan infeksi HIV.

"Sesuai dengan tata laksana, HIV tidak bisa lagi eksklusif, kalau dulu hanya di rumah sakit, sekarang harus diperbanyak sampai layanan primer, dan memang sudah ada layanan di puskesmas secara gratis," ucap Imran.

Kemudian, langkah kedua yang mesti dilakukan menurut Imran yakni menguatkan peran komunitas, karena yang bisa lebih menjangkau ODHIV adalah teman-teman komunitas, mengingat keterbatasan tenaga kesehatan (nakes) yang ada, utamanya di wilayah-wilayah tepuk.

"Karena kalau masyarakat kan tidak dekat, tetapi komunitas lebih dekat, yang bisa

ngomong (kepada ODHIV untuk berobat) itu komunitas, karena mereka yang pernah ada di titik itu, tetapi saya tegaskan, secara umum, obat untuk ODHIV itu gratis," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa Kemenkes atau pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi HIV/AIDS ini.

"Tidak hanya HIV, semua penyakit itu tidak bisa Kemenkes sendiri yang bergerak, pasti kita akan melibatkan sektor-sektor yang lain, koordinasi kita lakukan terus dengan kementerian/lembaga yang lain," kata dia.

Adapun Kemenkes mencatat cakupan testing HIV pada populasi dengan risiko terinfeksi HIV yakni 7.197.512 jiwa, dengan populasi yakni ibu hamil, pasien tuberkulosis, warga binaan pemasyarakatan (WBP), pasien infeksi menular seksual

(IMS), lelaki suka lelaki (LSL), wanita pekerja seks (WPS), dan pengguna narkoba suntik (penasun).

Agar kasus HIV/AIDS dapat terus dikawal dengan baik oleh pemerintah daerah, Imran menyarankan agar penanganan penyakit tersebut bisa masuk dalam standar pelayanan minimal (SPM) kepala daerah, karena itu dapat dilihat sebagai rapor kepala daerah atas kepemimpinannya.

"Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana semua pihak bisa mengakses akuntabilitas dari pemda, karena itu memang harus dipertanggungjawabkan. Ada 12 indikator SPM Kemenkes, salah satunya adalah untuk HIV. Ini bisa menjadi salah satu upaya mengingatkan kembali, bahwa kepala daerah memiliki tugas untuk menangani HIV/AIDS di wilayah, sehingga mereka harus akuntabel," kata Imran. ● tom

Kasus Pneumonia Misterius di Tiongkok Naik, Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Panik

JAKARTA (IM) - Kasus pneumonia misterius tengah melanda Tiongkok. Penyakit tersebut banyak mengenai anak-anak sampai harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terkait hal tersebut, Kementerian Kesehatan RI memastikan pihaknya akan memantau kasus tersebut agar tidak tersebar di Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr. Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan kalau penyakit pneumonia

tersebut disebabkan bakteri mycoplasma pneumoniae yang lebih sering menyerang anak-anak dibandingkan orang dewasa.

"Kita lihat WHO sudah keluaran pedoman kalau penyebabnya karena bakteri. Jadi kita gak perlu terlalu khawatir karena penularannya gak seperti virus," kata Nadia.

Infeksi bakteri mycoplasma pneumoniae sendiri bukan hal baru dalam dunia kesehatan. Nadia mengatakan kalau obat untuk menangani bakteri itu juga sudah ada di Indonesia. Sehingga masyarakat tidak perlu panik.

"Sampai saat ini kita kalau mycoplasma obatnya ada di Indonesia. Ini kan bukan suatu penyakit baru. Tinggal memastikan diagnosis bahwa itu memang penyebabnya Mycoplasma," imbuhnya.

Nadia menambahkan kalau Kemenkes telah menyebarkan surat edaran ke setiap Puskesmas di setiap daerah. Pesannya, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan adanya pneumonia misterius tersebut.

Meski kasus serupa belum ada di Indonesia, Nadia mengingatkan agar masyarakat tetap lakukan tindakan pencegahan dengan pola

hidup bersih dan sehat. Tata cara itu juga yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dengan melakukan cuci tangan, jaga jarak dengan orang asing, pakai masker saat sakit, juga pastikan ventilasi ruangan baik.

"Kewaspadaan biasa kita dilakukan di pintu masuk melalui pintu masuk kesehatan pelabuhan. Terutama orang dengan gejala flu, kemudian kita beri edukasi kalau bertamabah berat datang ke fasilitas kesehatan. Pengawasan seperti bahan makan, produk hidup lainnya tentu kita tingkatkan,"

kata Nadia.

Peningkatan kasus pneumonia misterius itu dilaporkan pertama kali oleh Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok pada 13 November 2023. Hanya dalam waktu satu minggu, pemerintah Tiongkok mencatat 205 kluster influenza. Padahal, seminggu sebelumnya hanya terdeteksi 127 kluster, kebanyakan pasien berupa anak-anak. Sejauh ini, pasien yang terjangkit pneumonia itu dilaporkan alami gejala demam, kelelahan, dan batuk. ● tom

SAMBUNGAN

MK Tolak "Gugatan Ulang" Syarat Usia...

DARI HAL 1

koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk "upaya hukum," ungkapnya.

Adanya pelanggaran etika berat yang melibatkan eks Ketua MK Anwar Usman dalam penyusunan Putusan 90, tak serta-merta membuat putusan itu dapat disidangkan ulang dengan majelis hukum yang berbeda, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Kekuasaan Kehakiman dianggap sebagai undang-undang yang sifatnya lebih umum, ketimbang UU MK yang menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

Sesuai asas hukum lex specialis derogate lex generalis, maka beleid yang bersifat khusus akan mengesampingkan beleid yang sifatnya umum.

"Pembentukan majelis yang berbeda untuk memeriksa kembali perkara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 tidak mungkin dapat diterap-

kan di Mahkamah Konstitusi," kata Enny.

"Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, di dalam mempertimbangkan dalil permohonan pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus," katanya menandakan.

MK juga menyinggung kembali putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait Anwar Usman, pada Pasal 358, yang pada intinya

menegaskan bahwa meskipun terdapat pelanggaran etika berat, Putusan 90 sudah berkekuatan hukum tetap sesuai prosedur.

Anwar Usman Tak Ikut

Dalam putusan ini, eks Ketua MK Anwar Usman tak terlibat mengadili perkara dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), sebagaimana permintaan pemohon dan amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) 7 November lalu.

Pemohon, mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana (23), merasa perlu melayangkan gugatan ini karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti lahir melibatkan pelanggaran etika berat Anwar.

Dalam petitum permohonannya, Brahma meminta agar syarat usia minimum capres-cawapres berbunyi "40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni gubernur dan/atau wakil gubernur". ● mar

KPK Tarik Pengawal dan Tak Beri...

Keuangan, Kedudukan, Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK," ujar Ali Fikri.

Sebagai informasi, pihak Kepolisian telah melayangkan surat panggilan kepada Firli Bahuri, untuk diperiksa penyidik pada Jumat (1/12).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya mengatakan, surat panggilan terhadap Firli baru dilayangkan pada Selasa (28/11).

"Telah dilayangkan surat panggilan kepada FB dalam kapasitas sebagai tersangka untuk dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap FB sebagai tersangka," ujar Trunoyudo, Selasa

(28/11).

Firli bakal dimintai keterangan sebagai tersangka untuk pertama kalinya pada Jumat (1/12).

Rencananya, Firli bakal diperiksa di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri pukul 09.00 WIB.

"(Diperiksa) Di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri oleh penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrim-sus Polda Metro Jaya dan

Dittipidkor Bareskrim Polri," katanya.

Sementara itu, Kapuspren TNI Laksma Julius Widjojono menegaskan, bahwa sesuai Undang-Undang TNI Pasal 7 (2) b. 5, Puspom TNI hanya memberikan pengamanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi, dan bukan kepada Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Julius mengatakan hal itu

pun juga disepakati dalam nota kesepahaman antara TNI dan lembaga antirasuah itu.

"Surat pengamanan yang dimaksud sesuai Undang-Undang adalah pengamanan objek vital, bukan personel. Saya tidak pernah menyebutkan pengamanan terhadap Firli, tidak pernah, terhadap Ketua KPK, tidak pernah," kata Julius kepada wartawan, Rabu (29/11). ● mar

Tiongkok Beri Peringatan Keras...

Negara Tiongkok untuk Kantor Urusan Taiwan, mengatakan, Beijing tidak akan menggerakkan kekuatan penuh di Taiwan jika mereka mempromosikan separatisme, demikian dilansir RT.

Dia mengutip Undang-undang Anti-pemisahan Beijing tahun 2005, yang menegaskan kembali bahwa

Tiongkok memandang Taiwan sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya. Undang-undang tersebut memungkinkan Beijing untuk menggunakan cara-cara sepihak dan tidak damai untuk mencapai penyatuan dengan pulau tersebut, yang telah memiliki pemerintahan sendiri sejak 1949 dan pada masa

Perang Saudara Tiongkok.

"Saya ingin menekankan bahwa kemerdekaan Taiwan berarti perang," kata Chen tegas sambil menyebut Lai dan Hsiao sebagai separatis.

Chen lebih lanjut menuduh pasangan tersebut memutarbalikkan fakta dan meremehkan risiko kegiatan separatist untuk menipu pe-

milih menjelang pemilu 2024.

Pada pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden di California awal bulan ini, pemimpin Tiongkok Xi Jinping memperingatkan bahwa Taiwan berpotensi tetap menjadi masalah paling berbahaya dalam hubungan antara Washington dan Beijing.

Berdasarkan Undang-

Undang Ketahanan yang Ditingkatkan Taiwan tahun 2022, pemerintah AS diberi wewenang untuk membelanjakan hingga USD2 miliar per tahun dalam bentuk bantuan hibah militer ke pulau tersebut dari 2023 hingga 2027. Sementara itu, Taiwan memiliki lebih dari USD14 miliar peralatan militer AS yang dipesan. ● mar

Ibu Melahirkan Bayi di Kapal Cepat...

detik-detik penumpang kapal cepat melahirkan bayi perempuan di dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Karimun pun viral di sosial media.

Awalnya, pasangan Hasan dan Norzila ini memeriksa kandungannya di Puskesmas Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Dari diag-

nosa tim medis, pasien sudah kontraksi dengan bintika tiga.

Lalu, pasien meminta untuk dirujuk ke Rumah Sakit Tanjung Balai Karimun untuk persalinan caesar, mengingat bayi pertama dilakukan persalinan caesar dan jarak usia kandungan dengan bayi pertama belum mencukupi

dua tahun.

Akhirnya pihak Puskesmas melakukan rujukan dengan menyiapkan pendamping bidan.

Menurut dokter Puskesmas, Yosi Novita, pasien dibawa dengan menggunakan kapal cepat pukul 08.00 WIB.

"Selang setengah jam perjalanan laut, pasien mering-

kesakitkan. Sontak bidan yang sudah disiapkan membantu persalinan bayi di dalam kapal cepat tersebut," katanya.

Dengan peralatan medis yang sudah disiapkan, selang setengah jam kemudian bayi berjenis kelamin perempuan dengan bobot 2,6 kilogram dan panjang 49 centimeter

berhasil diselamatkan dengan persalinan normal.

Setelah menjalani perawatan medis selama satu malam, kini ibu dan bayi yang diberi nama Putri Kurniawati tersebut dalam kondisi sehat dan sudah dipulangkan ke rumahnya di Kuala Kampar. ● osm

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Bambang Suryo Sularso.
PENANGGUNG JAWAB: Prayan Purba.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularso.
ARTISTIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI: A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.
AGEN: SOLO (ABC), BELITUNG (Naskafa Tjen).
PANGKAL PINANG (Yuliani, John Tanzil), **BALIKPAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro),
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Beni, Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN: Rp 2.500./eks (di luar kota Rp 3.000./eks), Harga Langganan Rp 50.000./Bulan.
PERCETAKAN: PT. International Media Web Printing
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
 Tel : 021-6265566
 Twitter: InternationalMedia @redaksi_IM